

OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCE PLANNING TO SUPPORT THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM IN ORDER TO REALIZE A RESILIENT NATIONAL DEFENSE

Ilham Mulhaq^{#1}, Widarta Kusuma^{#2}, Hendro Wijiantoro^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut
Jalan Ciledug Raya No.2, SESCOAL, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230
mulhaqilham@gmail.com*

Abstract — *The free nutritious meal program introduced by the Indonesian government under the Prabowo–Gibran administration represents a strategic policy aimed at improving children’s nutritional status, enhancing educational outcomes, and strengthening national resilience. This study examines the challenges and strategic role of human resource planning in supporting the implementation of the program. Using a qualitative approach, the research identifies three major issues: limited human resource competencies, inefficient logistics management, and suboptimal supervision and monitoring systems. The findings reveal that inadequate skilled personnel and weak coordination across the supply chain hinder the effectiveness of food distribution, particularly in remote areas. Furthermore, the absence of an integrated monitoring system reduces the program’s impact on improving children’s nutrition. The study highlights the strategic contribution of the Indonesian Navy in addressing these challenges through comprehensive human resource planning, including capacity building, structured training, cross-sectoral logistics coordination, and technology-based monitoring systems. Strengthening these aspects is essential to ensure the sustainability and effectiveness of the program, which ultimately contributes to the development of a healthy, productive generation and supports a resilient national defense system.*

Keywords — *Human Resource Planning, Free Nutritious Meal Program, Logistics Management*

I. PENDAHULUAN

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program kebijakan populis pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Prabowo–Gibran) pada pemilu 2024. Kebijakan program ini berisikan pemberian makan siang dan susu di sekolah maupun di pesantren secara gratis di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membangun generasi yang pintar, sehat dan unggul dalam daya saing, serta berkontribusi pada produktivitas ekonomi dan pertahanan negara yang tangguh. Fokus program ini adalah meningkatkan standar gizi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Program kebijakan ini diberikan kepada + 82,9 juta orang dengan spesifikasi anak balita, murid sekolah dan ibu hamil, dengan estimasi besaran dana yang diperlukan mencapai Rp 450 triliun pertahun (Amazihono, 2015). Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut menimbulkan sumber pendanaan dan implikasinya terhadap keuangan negara. Program unggulan makan dan susu gratis bagi anak sekolah telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia, ada yang setuju dan yang kontra terhadap program tersebut. Pihak yang setuju menyatakan bahwa program ini akan memberikan dampak positif bagi tingkat kesehatan dan gizi anak Indonesia. Program makan bergizi gratis selain memberikan nutrisi gizi juga untuk meningkatkan prestasi dan performa peserta didik (Merlinda and Yusmar, 2025). Sedangkan bagi yang kontra akan menganggap bahwa program ini bukan program yang produktif, melainkan program konsumtif yang tidak mendidik (Putriyekt, *et al.*, 2025).

Program makan bergizi gratis secara prakteknya telah dilakukan di beberapa negara maju untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Qomarrullah, *et al.*, 2025). Seperti halnya negara Amerika Serikat, sekitar 30 juta anak sekolah mendapatkan manfaat dari program tersebut, dengan besaran biaya tahunan mencapai sekitar USD 18,7 miliar (Aji, 2025). Pelaksanaan program makan bergizi gratis di negara tersebut telah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, perekonomian nasional dan pertahanan negara. Tercatat bahwa program ini memberikan keuntungan kesehatan dan ekonomi sebesar USD 40 miliar, sehingga menghasilkan surplus sekitar USD 21 miliar. Negara Amerika Serikat memulai program makan bergizi gratis pada tahun 2010. Negara Finlandia menerapkan program ini pada

tahun 1943, kemudian disusul negara Swedia pada tahun 1945, selanjutnya negara Estonia pada tahun 2002, Korea Selatan pada tahun 2011, Inggris pada tahun 2014 dan negara Jepang pada tahun 1947, tetapi sifatnya mandatori dan subsidi bagi keluarga yang kurang mampu (Cohen, *et al.*, 2021).

Makan bergizi gratis telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung program ini. Dalam pelaksanaannya, program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak Januari 2025 menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah: 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas; 2) Pengelolaan logistik yang kurang efisien; dan 3) Pengawasan dan monitoring yang belum optimal.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI AL bertugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut guna mendukung pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI AL juga berkewajiban untuk turut serta mensukseskan program makan bergizi gratis karena memiliki korelasi yang erat dengan pertahanan negara. Program prioritas nasional ini berkontribusi langsung pada pembangunan SDM yang sehat, kuat, dan produktif, yang merupakan fondasi utama bagi pertahanan negara. Dengan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini, program ini membantu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang tangguh dan siap berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk pertahanan negara.

Sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional, TNI AL juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan manajemen logistik pada program makan bergizi gratis, khususnya pada bidang perencanaan SDM. Perencanaan SDM perlu dilakukan untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi atau lembaga. Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi atau lembaga terhadap kebutuhan akan SDM, sehingga organisasi atau lembaga tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Fungsi perencanaan SDM adalah memformulasikan dan mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana organisasi, mengkaji faktor sosial, teknologi dan yang lainnya sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap pekerjaan dan individu (Asriati, 2019).

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang di atas, adalah:

- a. Kompetensi SDM yang terbatas.
- b. Pengelolaan logistik yang kurang efisien.
- c. Pengawasan dan monitoring yang belum optimal

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kompetensi SDM yang tersedia saat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia?
- b. Bagaimana pengelolaan logistik untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia?
- c. Bagaimana pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia?

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Sistem pertahanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan semesta dan diselenggarakan oleh pemerintah serta dipersiapkan secara dini melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa dalam menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah untuk membangun SDM yang sehat, kuat, dan produktif. Program ini juga bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini, sehingga dapat tumbuh menjadi SDM unggul yang menjadi fondasi utama pertahanan negara.

- b. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 9 huruf e UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa tugas TNI AL adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut untuk mendukung pertahanan negara. Dalam konteks program makan bergizi gratis, TNI AL berperan aktif melalui pembinaan masyarakat pesisir untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil, terutama wilayah pesisir yang sulit dijangkau. Dengan mengoptimalkan peran pangkalan-pangkalan TNI AL sebagai pusat logistik dan distribusi, TNI AL dapat memastikan makanan bergizi sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik kepada masyarakat di wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

c. Teori Perencanaan SDM.

Perencanaan SDM adalah suatu proses yang sistematis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi. Simamora menekankan bahwa efektivitas perencanaan SDM suatu perusahaan tergantung pada kualitas dan ketersediaan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan (Simamora, 1997). Handoko menjelaskan bahwa perencanaan SDM bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan individu, dengan mengestimasi kebutuhan karyawan, mengantisipasi penawaran tenaga kerja di masa mendatang, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan situasi tertentu di masa depan (Handoko, 2014). Amstrong menyoroti pentingnya perencanaan SDM dalam strategi manajemen SDM, dimana integrasi antara kebutuhan perusahaan dan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan organisasi (Saad, 2013). Sutrisno menambahkan bahwa faktor internal organisasi, seperti keputusan strategis, anggaran, produksi, penjualan, dan desain organisasi, mempengaruhi perencanaan SDM (Sutrisno, 2017). Wahyudi juga menekankan pentingnya departemen, tim kerja, dan individu dalam perencanaan kebutuhan SDM yang diselaraskan dengan tujuan dan lingkup pekerjaan dalam organisasi. Selain itu, tantangan kritis yang dihadapi organisasi dalam menghadapi globalisasi juga menjadi sorotan dalam literatur (Wahyudi, 2001). Ulrich seperti yang dikutip dalam beberapa penelitian menyoroti pentingnya organisasi membangun kemampuan baru untuk menghadapi perubahan global yang cepat (Ulrich, 1998). Globalisasi mempengaruhi persaingan global dan menuntut organisasi untuk memperkuat posisinya serta merebut peluang yang ada. Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa perencanaan SDM memiliki peran yang krusial dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, mengidentifikasi kebutuhan masa depan, dan menghadapi tantangan global yang kompleks. Integrasi antara kebutuhan organisasi, karyawan, dan lingkungan bisnis menjadi kunci dalam pengembangan strategi perencanaan SDM yang sukses.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kurangnya kompetensi SDM.

Kurangnya kompetensi SDM merupakan salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa saat ini jumlah tenaga terlatih yang tersedia sangat terbatas, dengan hanya 28 orang staf yang sebagian besar merupakan pejabat eselon tinggi, sehingga belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi, diolah secara higienis, dan didistribusikan dengan tepat waktu, sehingga kualitas dan efektivitas program menjadi kurang optimal.

Selain keterbatasan jumlah tenaga, kompetensi SDM yang ada juga belum memadai dalam hal pengelolaan menu bergizi yang sesuai kebutuhan anak-anak dan pengawasan mutu makanan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas makanan yang disajikan dan kurangnya penerimaan dari penerima

manfaat, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif program terhadap peningkatan status gizi anak-anak.

2) Pengelolaan logistik yang kurang efisien.

Permasalahan lainnya adalah pengelolaan logistik yang kurang efisien. Kompleksitas rantai pasok (*supply chain*) yang melibatkan pengadaan bahan baku, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi ke berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, seringkali menimbulkan kendala, seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan makanan. Kurangnya koordinasi yang optimal antar pihak terkait, mulai dari pemerintah, penyedia bahan makanan, hingga sekolah sebagai titik distribusi, menyebabkan makanan tidak selalu sampai dalam kondisi segar dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas layanan program, tetapi juga berpotensi menurunkan minat anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang disediakan, sehingga tujuan peningkatan gizi kurang tercapai.

Selain itu, pengelolaan logistik yang belum terstandarisasi dan minimnya fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti *cold storage*, memperparah masalah efisiensi distribusi makanan bergizi. Pendekatan *near-sourcing* yang mengutamakan pemanfaatan bahan baku lokal dan pengelolaan *supply chain* yang lebih dekat dengan lokasi penerima diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan dan kerusakan makanan. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan infrastruktur.

3) Pengawasan dan monitoring yang belum optimal.

Permasalahan yang ketiga adalah pengawasan dan monitoring yang belum optimal. Meskipun pemerintah telah melibatkan berbagai pihak, termasuk universitas dan lembaga riset seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk mengembangkan protokol inovatif, implementasi di lapangan seringkali tidak terpantau dengan baik. Kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur menyebabkan sulitnya mendeteksi masalah, seperti kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan efektivitas program dalam meningkatkan gizi anak-anak. Akibatnya, banyak daerah yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program ini, terutama wilayah terpencil yang membutuhkan pengawasan lebih intensif untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan.

Selain itu, mekanisme pelaporan dan umpan balik dari masyarakat serta sekolah penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan perbaikan berdasarkan data nyata dari lapangan. Evaluasi menyeluruh terkait kualitas menu dan distribusi makanan masih bergantung pada laporan sporadis tanpa sistem monitoring yang konsisten. Tanpa pengawasan yang optimal, program ini berisiko kehilangan arah dan gagal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan status gizi anak-anak Indonesia.

4) Upaya-upaya.

Untuk mewujudkan pemecahan masalah di atas, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Peningkatan kompetensi SDM.

Dalam penanganan permasalahan kurangnya kompetensi SDM, TNI AL perlu melakukan perencanaan SDM yang komprehensif dengan fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja. TNI AL membantu pemerintah dan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang spesifik, seperti keahlian dalam pengelolaan gizi, pengolahan makanan yang higienis, serta manajemen distribusi makanan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kemudian disusun program pelatihan terstruktur yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi, yang melibatkan tenaga ahli gizi, koki profesional, serta tenaga pendukung lainnya. Pelatihan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga kualitas SDM yang terlibat dalam program makan bergizi gratis dapat merata di seluruh wilayah.

Selain itu, perencanaan SDM juga harus mencakup strategi rekrutmen dan retensi tenaga terlatih, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. TNI AL mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah guna mempercepat penyediaan tenaga ahli yang kompeten dan siap terjun ke lapangan. Pemberian insentif, seperti tunjangan khusus, kesempatan pengembangan karir, dan fasilitas pendukung lainnya, juga penting untuk memotivasi tenaga kerja agar tetap berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Dengan perencanaan SDM yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan kompetensi tenaga kerja dalam program makan bergizi gratis dapat meningkat secara signifikan, sehingga program ini dapat

berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

b) Pengelolaan logistik yang efektif dan efisien.

Mengatasi permasalahan pengelolaan logistik yang kurang efisien, perencanaan SDM harus difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam *supply chain*. TNI AL perlu mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM yang spesifik dalam bidang logistik, seperti manajemen distribusi, pengelolaan gudang, dan pengendalian kualitas makanan. Selanjutnya, disusun program pelatihan terstruktur yang mengajarkan teknik pengelolaan logistik modern, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan distribusi, serta prosedur standar dalam penyimpanan dan pengiriman makanan. Dengan peningkatan kompetensi ini, tenaga kerja dapat menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan memastikan makanan bergizi sampai ke penerima dalam kondisi terbaik.

Selain pelatihan, perencanaan SDM juga harus mencakup pembentukan tim koordinasi logistik lintas sektor yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, instansi terkait, penyedia bahan makanan, dan sekolah. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan mengoptimalkan proses distribusi serta mengatasi kendala yang muncul secara cepat dan tepat. Penggunaan sistem informasi terintegrasi yang memudahkan komunikasi dan pelaporan juga perlu didukung oleh SDM yang terampil dalam teknologi digital. Dengan pendekatan perencanaan SDM yang komprehensif ini, pengelolaan logistik dalam program makan bergizi gratis dapat menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mampu menjamin kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

c) Optimalisasi pengawasan dan monitoring program makan bergizi gratis.

Untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan monitoring, perencanaan SDM harus difokuskan pada pembentukan tim pengawas yang kompeten dan terlatih. TNI AL perlu mendorong pemerintah untuk merekrut tenaga ahli dari berbagai bidang, seperti gizi, logistik, dan teknologi informasi, untuk membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan program secara langsung di lapangan. Selain itu, pelatihan intensif juga perlu diberikan kepada tim ini agar mereka memiliki kemampuan dalam menggunakan alat monitoring modern serta memahami indikator keberhasilan program, seperti kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan dampak gizi terhadap anak-anak. Dengan SDM yang terlatih, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Selain pembentukan tim pengawas, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mendukung pengumpulan data secara real-time. Sistem ini memungkinkan pelaporan langsung dari sekolah atau daerah penerima manfaat ke pusat pengelola program, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Universitas seperti IPB yang telah dilibatkan dalam program ini dapat berkontribusi dengan menyediakan inovasi teknologi untuk mempermudah proses monitoring. Dengan perencanaan SDM yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi yang tepat, pengawasan program makan bergizi gratis dapat ditingkatkan secara signifikan, memastikan bahwa tujuan utama program tercapai dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemecahan masalah yang ditemukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kurangnya kompetensi SDM berpengaruh terhadap program makan bergizi gratis dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TNI AL dapat berperan dalam: 1) Perencanaan SDM yang komprehensif dengan fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja; 2) Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi secara spesifik; 3) Penyusunan program pelatihan terstruktur yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi; 4) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten; dan 5) Pemberian insentif kepada tenaga kerja di daerah terpencil.

b. Pengelolaan logistik yang kurang efisien berpengaruh terhadap program makan bergizi gratis dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TNI AL

dapat berperan dalam: 1) Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja; 2) Identifikasi kebutuhan SDM; 3) Penyusunan program pelatihan yang terstruktur; dan 4) Pembentukan tim koordinasi logistik lintas sektoral.

c. Pengawasan dan monitoring yang belum optimal berpengaruh terhadap program makan bergizi gratis dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TNI AL dapat berperan dalam: 1) Pembentukan tim pengawas yang kompeten dan terlatih; 2) Pelatihan tim pengawas; dan 3) Pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi.

REFERENSI

- Aji, W. T. (2025). Makan bergizi gratis di era Prabowo-Gibran: Solusi untuk rakyat atau beban baru? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 303.
- Amazihono, M. (2015). Analisis kemanfaatan kebijakan program makan siang gratis bagi peserta didik dan pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
- Asriati, Y. (2019). Analisa perencanaan sumber daya manusia dengan metode WISN pada petugas rekam medis Rumah Sakit X di Surakarta Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan*, 2(2).
- Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review. *Nutrients*, 13(3), 911. <https://doi.org/10.3390/nu13030911>
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. BPFE.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah tinjauan dari perspektif sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1366.
- Putriyeki, A., Sulistiawati, D., Khairani, N., & Kusuma, R. R. A. (2025). Analisis multidimensional sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis pada media sosial X. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1006.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 133.
- Saad, S. K. (2013). Contemporary challenges of human resource planning in tourism and hospitality organizations: A conceptual model. *Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism*, 12(4), 335–349. <https://doi.org/10.1080/15332845.2013.790248>
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak makan siang gratis pada kondisi keuangan negara dan peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 193.
- Simamora, H. (1997). *Manajemen sumber daya manusia* (2nd ed.). STIE YKPN.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Ulrich, D. (1998). A new mandate for human resources. *Harvard Business Review*, 76, 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahyudi, B. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Sulita.